

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah. Sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan setiap daerah. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan. Peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (yuwono, 2005). Dan dengan adanya Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Aturan Pelaksanaannya, Khususnya PP NO 105 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah maka terhitung sejak tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah.

Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. (Menurut Supriyono, 1990, p.15). anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan menggunakan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan

belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2002). Penganggaran merupakan suatu proses yang sangat rumit pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan perencanaan untuk melakukan tindakan agar tercapainya tujuan organisasi. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 18, 19, dan pasal 20. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 18 ayat (1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana landasan penyusunan rencana kerja anggaran dan pendapatan daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah paling lambat pertengahan bulan juni tahun berjalan. Atas kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Dewan

Perwakilan Rakyat melaksanakan pembahasan dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah.

Perilaku para aparaturnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah. Anggaran mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku individu. Anggaran memberikan informasi kepada individu mengenai apa yang diharapkan dan kapan harus dilaksanakan. Anggaran memberikan batasan mengenai apa yang boleh dibeli dan seberapa banyak yang boleh dibeli. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari proses anggaran. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. Kata-kata seperti keuangan dan angka muncul ketika seseorang berpikir mengenai anggaran. Tetapi, dilain hal yang berkaitan dengan anggaran, terdapat individu. Individulah yang menyusun anggaran dan individu jugalah yang harus hidup dengan anggaran tersebut. Tidak heran juga kalau setiap penyusunan anggaran, faktor perilaku harus dicermati dan dipertimbangan agar tujuan anggaran tercapai.

Didalam pembangunan hal yang tak kalah penting adalah tersedianya anggaran agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan dan anggaran merupakan dua hal yang saling berhubungan dalam proses pembangunan. Dimana perencanaan tanpa adanya anggaran maka tidak akan mungkin bisa terlaksananya sebuah pembangunan, dan sebaliknya walaupun

anggaran tersedia tapi tanpa perencanaan maka anggaran yang ada tersebut tidak akan bisa terpakai secara maksimal atau dalam penggunaannya tidak akan jelas arah dan tujuannya sehingga nilai anggaran yang ada itu bisa dikatakan tidak efektif.

Untuk melaksanakan pembangunan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam kaitannya dengan faktor dana ada suatu dana yang sangat penting perannya dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari PAD, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Dalam penganggaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan inflasi.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengalokasian dana anggaran agar mengetahui perkembangan anggaran yang terjadi di setiap wilayah di Sumatera Barat, maka perlu untuk kita ketahui perkembangan dan penggunaan anggaran tersebut. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, anggaran pemerintah dikelola oleh pengguna anggaran.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diketahui bahwa anggaran yang digunakan pada tahun 2017 ini meningkat sudah baik atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas topik yang berjudul “Proses Penganggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan tentang proses penganggaran program dan kegiatan pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Apa saja program dan kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

1.3 Tujuan Magang

Diharapkan setelah selesai mengikuti kegiatan magang, penulis telah mampu dan terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang diperoleh selamamenempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas dengan tujuan yaitu :

- a) Untuk membantu penulis dalam mencari tahu mengenai proses penggaran program dan kegiatan yang diterapkan Dinas Pengendalian

penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

- b) Mengetahui masalah atau kendala yang terjadi dalam penganggaran serta mencari solusinya pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat,
- c) Untuk memenuhi sebagai syarat-syarat guna menyelesaikan studi program Diploma III Jurusan Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,
- d) Untuk meningkatkan daya pikir mahasiswa didalam bekerja pada kehidupan kerja nyata,
- e) Melatih mahasiswa untuk bisa bersosialisasi dengan rekan kerja dan juga lingkungan kerja,
- f) Bisa membandingkan penerapan teori dan ilmu yang didapatkan pada bangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata didunia nyata,
- g) Memperdalam pengetahuan penulis tentang penerapan program dan kegiatan untuk menunjang tugas pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan daerah,
- h) Untuk memenuhi mata kuliah wajib yang diikuti.

1.4 Manfaat Magang

Penelitian ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu :

- Untuk mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
- Membantu penulis untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem kinerja serta aktivitas yang dilakukan pada Dinas Pengendalian penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatra Barat
- Penulis mengerti tentang laporan akuntabilitas, sistem, tata cara penilaian kinerja yang diterapkan pada Dinas Pengendalian penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatra Barat
- Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai dokumen yang terkait pada pelaporan berdasarkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pengendalian penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatra Barat.

b. Bagi Universitas

- Untuk menjalin kerja sama serta hubungan baik serta kependidikan dengan instansi/perusahaan serta dapat meningkatkan kualitas lulusnya melalui pengalaman kerja magang dan Universitas juga dikenal oleh dunia kerja.
- Menciptakan SDM dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
- Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan mampu memecahkannya.

- Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam bentuk yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin yang berbeda.
- Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh ditempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi ini.

c. Bagi Tempat Magang

- Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan instansi/perusahaan sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih baik antara kedua pihak dan instansi/perusahaan tersebut lebih dikenal oleh kalangan akademis.
- Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Magang adalah syarat utama untuk melalui proses pendidikan program Diploma III Universitas Andalas. Mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk melakukan magang disuatu perusahaan sebelum mendapatkan gelarnya. Magang merupakan bagian dari penilaian kerja, dalam kegiatan magang kita memiliki kesempatan mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari dibangku kuliah dan mempelajari dengan detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional.

Penulis melakukan magang di Dinas Pengendalian penduduk, KB, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatra Barat .Magang berlangsung selama 40 hari.

1.6 Sistematika Laporan Magang

Adapun sistematika yang penulis muat dalam laporan magang ini, penulis bagi atas 5 (lima) BAB saling berkaitan/berhubungan satu sama lainnya, Sistematika laporan magang, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama menjelaskan tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan/magang, langkah-langkah atau cara pencapaian tujuan, tempat, waktu dan kegiatan magang, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua menjelaskan secara teoritis landasan materi mengenai pengertian penganggaran, fungsi anggaran serta landasan hukum anggaran

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, secara umum, visi, misi, serta srtuktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

BAB IV PEMBAHASAN

Bab keempat berisi hasil yang telah penulis peroleh atau dapatkan selama aktivitas magang yang penulis jalani, atau berupa kegiatan laporan magang yang dilaksanakan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait dengan perencanaan dan penganggaran di dinas tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari laporan magang yang dikaitkan dengan tujuan pembuatan laporan magang dan saran-saran yang dapat diberikan sehingga menjadi masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

